

IKHTIAR EKSEKUTIF

Sebagaimana telah menjadi komitmen Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2017 – 2022 ingin mewujudkan visi “Mewujudkan Masyarakat Flores Timur yang aman, nyaman, tentram dan tertib serta patuh pada peraturan yang berlaku dalam bingkai “DESA MEMBANGUN KOTA MENATA”

Pada tahun ke tiga yakni 2020, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur menetapkan 5 sasaran yang ingin diwujudkan / dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Penunjang.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban
4. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku
5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum serta pencegahan tindak criminal

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa rata – rata tingkat capaian kinerja dari 5 sasaran di atas adalah sebesar 99,72 % (Catatan berdasarkan Belanja Langsung Tahun 2020) Hasil ini mencerminkan Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur selama Tahun 2020. Pencapaian Kinerja tersebut dilaksanakan melalui 8 program dan 25 kegiatan (termasuk kegiatan penunjang yang capaiannya dapat dilihat pada tabel)

No	Uraian Sasaran	Uraian Program / Kegiatan	Rata-Rata Capaian Kinerja	Skala Ordinal
1	2	4	6	7
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memenuhi standar operasional	Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan 4. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Teknis Perkantoran	99,88	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya Pemenuhan kebutuhan akan Sarana Prasarana Memadai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	98,55	Sangat Berhasil

3	Terwujudnya Aparatur yang mempunyai kompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	99,86	Sangat Berhasil
4	Tersedianya Dokumen dokumenPerkantoran	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	99,91	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan	97,80	Sangat Berhasil
6	Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat yang taat dan patuh pada peraturan	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Pengamanan dan Penegakan PERDA 2. Operasi Gabungan 3. Pengamanan Pilkada 4. Fasilitasi Bantuan Kendali operasional (BKO)	98,93	Sangat Berhasil
7	Terlatihnya Tenaga Linmas	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Linmas	96,16	Sangat Berhasil
8	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.	82,12	Sangat Berhasil

Sedangkan dalam hal akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa Anggaran tahun 2019 Realisasi Belanja Daerah per 31 Des 2019 sebesar Rp. 6.124.266.283,- atau **98,39** % dari anggarannya sebesar Rp. **6.224.325.110,-**

Realisasi Belanja Operasi per 31 Des 2019 sebesar **Rp 6.023.653.483.** atau **98,71** % dari anggarannya sebesar **Rp. 6.102.545.510,-** Realisasi Belanja Modal per 31 Des 2019 sebesar **Rp 100.614.800,-** atau **82,62** % dari anggarannya sebesar **Rp. 121.779.600,-**

Dapat di rincincikan sebagai berikut :

Jenis	Per 31 Des 2019			Per 31 des 2018	
	Anggaran(Rp)	Realisasi	%	Realisasi	%
Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Daerah	6,224.325,1107,-	6.124.268.283,-	98,39	6.069.168.531,-	99,14
Belanja Operasi	6.102.545.510,-	6.023.653.483,-	98,71	5.574.564.356,-	99,18
Belanja Modal	121.779.600-	100.614.800-	82,62	494.604.175-	98,53

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja keuangan sbb : dasarnya, dalam pelaksanaan kegiatan pada program – program yang telah direncanakan tidak mempunyai hambatan berarti, ini terlihat dari realisasi secara umum dan menyeluruh hampir mencapai 97,51 % dengan realisasi belanja daerah sebesar 98,39%. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang atau serapan anggaran rendah . Hal ini disebabkan :

1. Penyediaan jasa Air dan Telpon sisa anggaran harus dikembalikan ke kas Daerah karena pembayaran sesuai dengan penggunaan .
2. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai, oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur masih belum sepenuhnya dipahami dan dikenal oleh instansi atau unit kerja lainnya sehingga dalam pelaksanaan tugas masih mengalami hambatan.
4. Adanya Image yang kurang kondusif terhadap keberadaan Sat.Pol.PP
5. Kurangnya keterlibatan aktif dari Sat.Pol. PP dengan Banpol PP Kecamatan sehingga dalam hal koordinasi antar wilayah berjalan lambat dan kurang responsif.

strategi Pemecahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Sisa dana yang tidak digunakan disetor ke kas daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan penegasan kepada para pimpinan SKPD dan instansi terkait lainnya yang mempunyai PERDA bersifat mengatur agar proses penyelidikan, penyidikan terhadap masalah – masalah pelanggaran PERDA dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di wilayah Flores Timur untuk menyelesaikannya secara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melibatkan PPNS yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

3. Mengadakan Pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota Sat. Pol. PP Kabupaten Flores Timur guna meningkatkan Sumber Daya Aparatur bagi kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Lebih mengutamakan upaya preventif daripada upaya represif dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya para pengunjung rasa yang menyalurkan aspirasinya agar tidak berbuat anarkis guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Larantuka, JANUARI 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur,

DONATUS KOPONG WERAN, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600727 199303 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi , pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggung jawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing – masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian Akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang Akuntabel., sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem LAKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.

B. GAMBARAN UMUM SKPD SAT POL PP

1. Kedudukan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut ini di uraikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud sebagai berikut :

Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas **menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat**

Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- 1) Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah
- 4) Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Aparatur lainnya
- 6) Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

a. Sumber Daya Manusia

- ❖ Data Kepegawaian Sat Pol PP Kabupaten.

Berikut ini kami sajikan data kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur berdasarkan :

1. Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	orang
2	Pembina Tk.I (IV/b)	1	orang
4	Pembina (IV / a)	3	orang
5	Penata Tingkat I (III/d)	10	orang
6	Penata (III/c)	1	orang
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	orang
8	Penata Muda (III/a)	4	orang
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	11	orang
10	Pengatur (II/c)	11	orang
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3	orang
12	Penata Muda (II/a)	2	orang
13	Juru Tingkat I (I/d)	0	orang
14	Juru (I/c)	0	orang

15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1	orang
16	Tenaga Kontrak	70	orang
TOTAL		123	orang

II. Pendidikan

a. Pendidikan Formal :

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Pasca Sarjana (S2)	1 orang	0 Orang
2	Sarjana (S1)	6 orang	10 Orang
3	Diploma (D3)	3 orang	1 Orang
4	SMA	40 orang	40 Orang
5	SLTP	1 orang	0 Orang
6	SD	0 orang	0 Orang

b. Pendidikan Struktural :

NO	JENIS DIKLAT PIM	JUMLAH
1	PIM II	0 Orang
2	PIM III	2 Orang
3	PIM IV	11 Orang

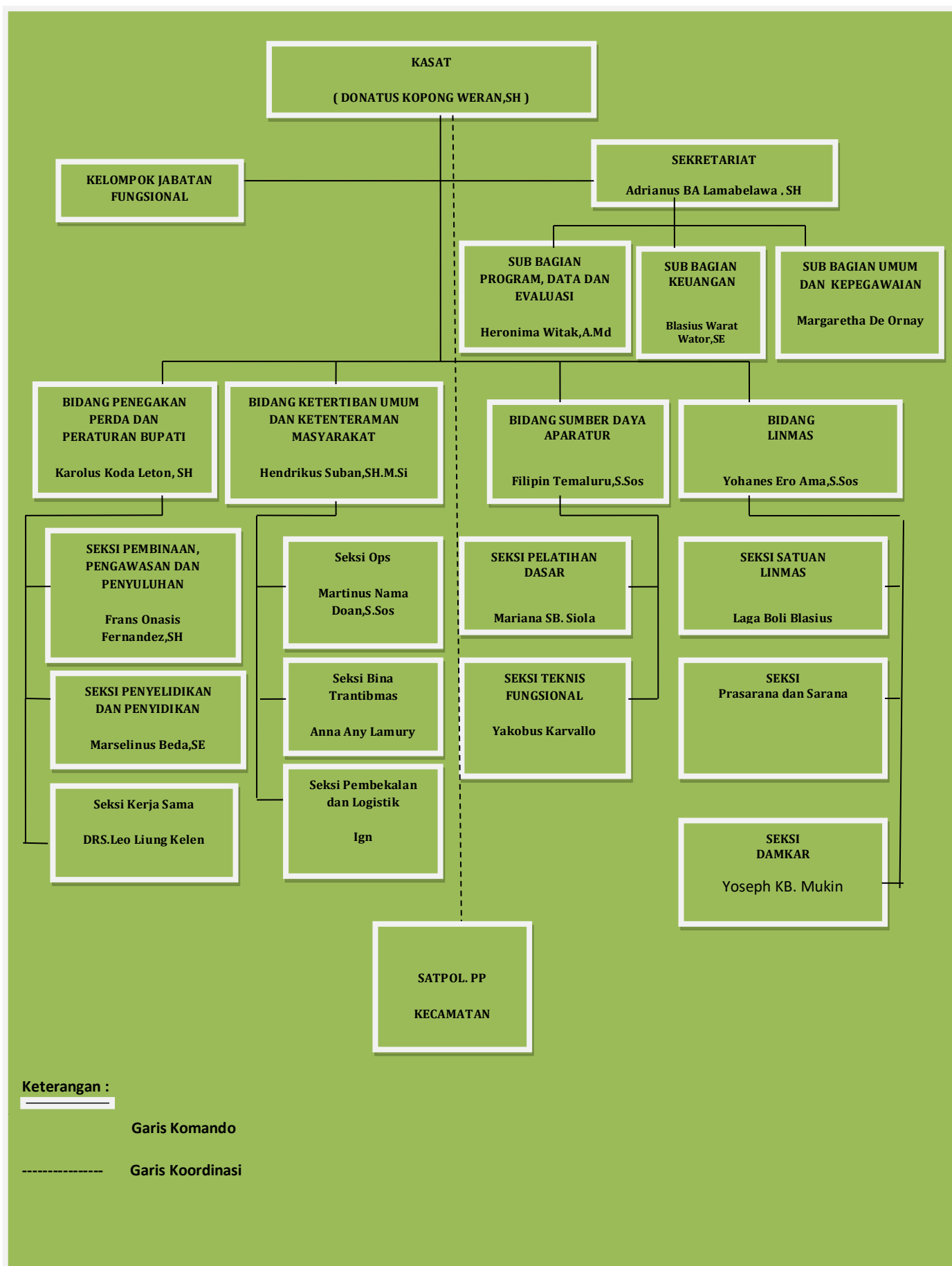
c. Pendidikan/ Diklat Fungsional Struktural :

NO	JENIS DIKLAT FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Diklat PPNS	5 Orang
2	Diklat Dalmas	2 Orang
3	Diklat Intelejen	4 Orang
4	Diklat Provos	1 Orang
5	Diklat Sarana Prasarana/ Perlengkapan	1 Orang
6	Diklat Damkar	6 Orang

b. Struktur Organisasi/Jabatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur berdasarkan Amanat Peraturan Daerah No: 4 Tahun 2013 Tanggal 22 April 2013 dipimpin oleh Kepala Satuan dengan Ruang kepangkatan Eselon II b

Struktur organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dapat di jabarkan sebagai berikut :



A. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan mendasar yang turut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dimaksud, sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya Koordinasi lintas SKPD dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dapat ditunjukkan dengan ketika terjadi persoalan baru melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Masih kurangnya Anggaran yang dialokasikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur sebagai akibat minimnya kemampuan keuangan Daerah
- c) Minimnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki
- d) Masih kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya serta pendistribusiannya belum merata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pengadaan CPNSD Formasi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun-tahun yang lalu cukup banyak namun tidak ditempatkan sesuai Formasi dimaksud
- e) Penempatan Pejabat Struktural tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak memahami tugas dan fungsinya sehingga beban pekerjaan yang di berikan tidak dapat diselesaikan dengan baik.
- f) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati berbagai Aturan/produk hukum daerah yang ada
- g) Kondisi Geografis dan Iklim yang kadang kurang bersahabat

Berikut ini disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Tabel.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Aspek kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
kualitas dan kompetensi aparatur Satpol. PP	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur Satpol. PP	Pendidikan khusus masih kurang	Perencanaan sistem pengembangan SDM belum berjalan baik	Terbatasnya anggaran	Responsifitas terhadap Tupoksi Rendah (Menunggu Perintah).

Prasarana dan Sarana Penunjang	Terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang TUPOKSI	Ketersediaan Prasarana dan sarana penunjang		Tuntutan dan perhatian belum berjalan seimbang	
Koordinasi lintas Sektor	Kurangnya koordinasi lintas SKPD	Tumpang tindih persoalan	Ketika timbul masalah baru melibatkan Pol. PP	Masing-masing SKPD berjalan sendiri-sendiri	Adanya keraguan aparat dalam mengambil suatu tindakan
Jumlah Personil	Jumlah Personil Satpol PP yang terbatas serta pendistribusiannya belum merata	Untuk Tk. Kabupaten 100 Orang dan Untuk Tk. Kecamatan minimal 6 Orang	Tugas pokok dan fungsi belum berjalan maksimal	Mutasi masuk dan keluar tidak sebanding dan penempatan yang tidak sesuai dengan formasi	Koordinasi dan komunikasi ke tingkat bawah kurang berjalan baik.
Relevansi Aturan (PERDA)	Terdapat beberapa aturan PERDA yang kurang sesuai dengan kondisi/perkembangan	Aturan sanksi yang bersifat umum	Pemahaman apartur terhadap aturan masih rendah	Peraturan Bupati tentang juklak dan juknis suatu perda kadang tidak disiapkan	Penegakan PERDA belum berjalan optimal
Ketaatan terhadap aturan	Masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap PERDA	Masih tingginya pelanggaran PERDA	frekwensi Operasi Penertiban yang kurang	Kurangnya sosialisasi dari SKPD Teknis maupun Pemahaman masyarakat yang masih rendah	Masih terbatas pada tindakan-tindakan yang bersifat persuasif

B. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur tahun 2019 merupakan jabaran dari Rencana Strategi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam Rincian Alur Sebagai Berikut berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Tujuan dan Manfaat Lakip
- B. Gambaran Umum SKPP Sat Pol PP
 - Kedudukan SKPD
 - Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Lingkungan Strategis
 - Sumber Daya Manusia
 - Struktur Organisasi Sat Pol PP
- D. Permasalahan Utama
 - Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD Sat Pol PP
- E. Sistematika Penyajian

BAB II : PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB.IV : PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

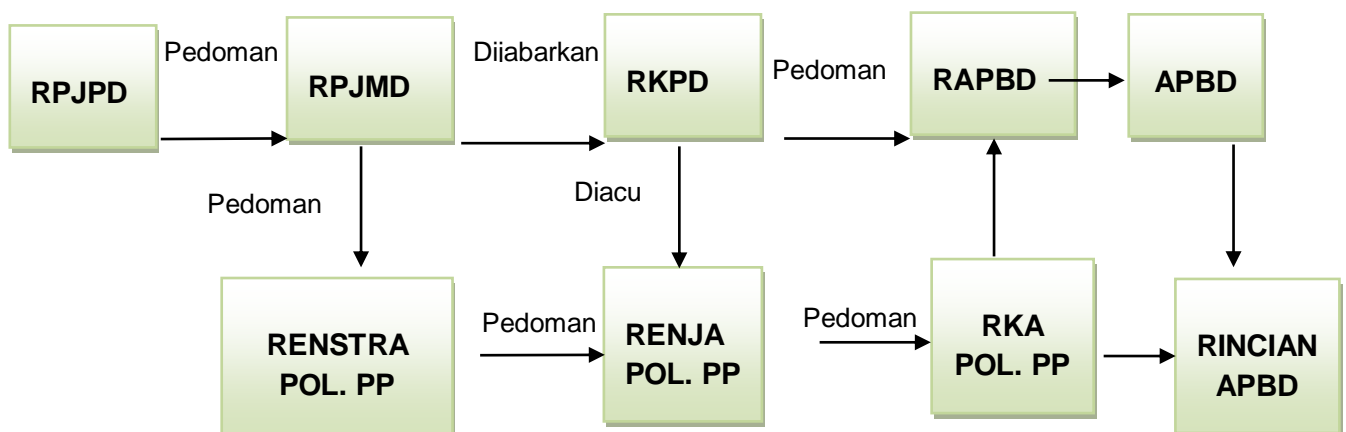
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting karena kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif menjadi persyaratan utama terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberian Pelayanan terbaik kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan (Perencanaan Strategis) yang baik pula sehingga semua tugas dan tanggungjawab yang diemban dapat terlaksana.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan SKPD Lima Tahunan yang disusun dengan senantiasa berpedoman pada RPJP, RPJMD maupun Renstra Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dan RKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban lebih lanjut.

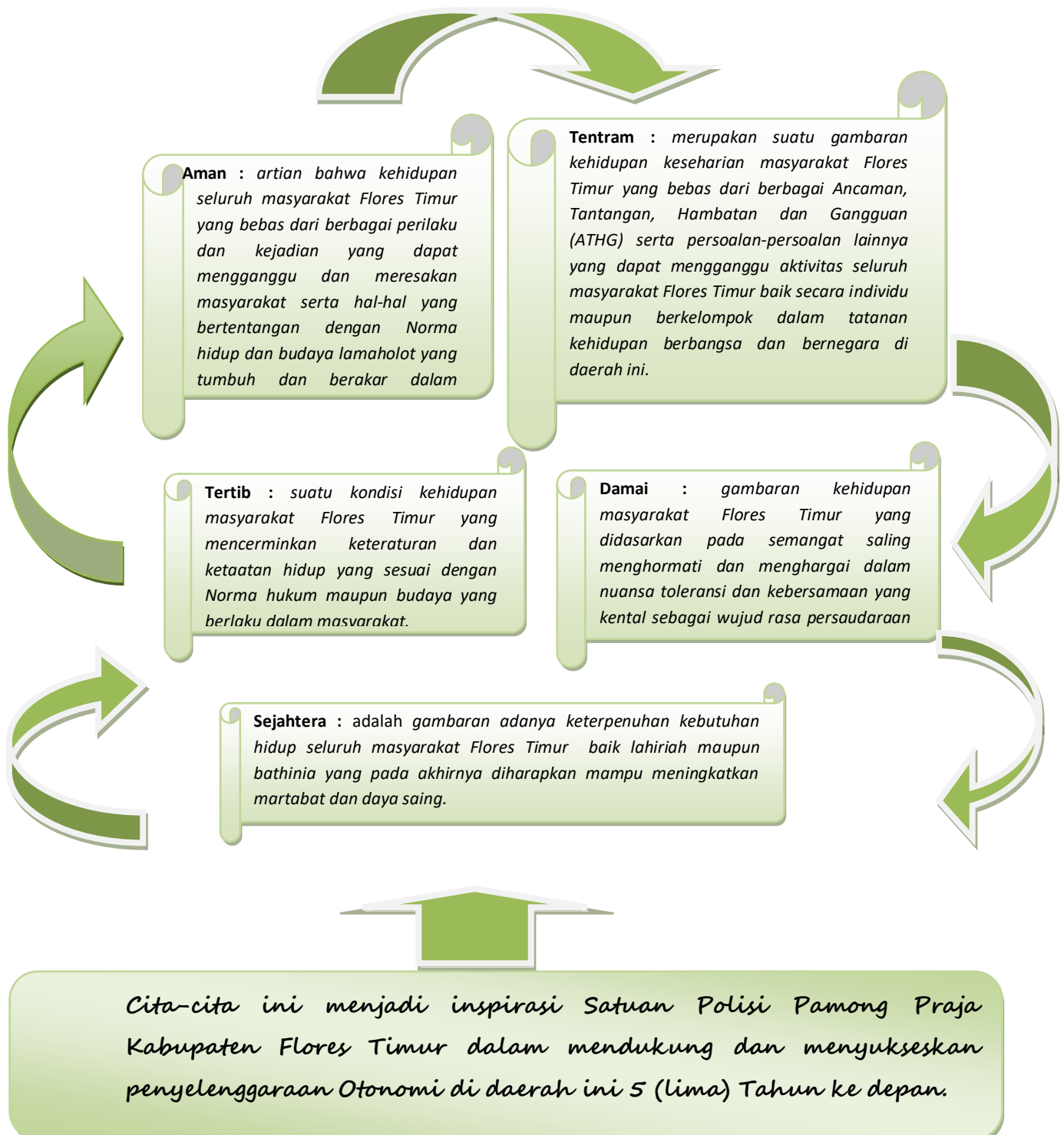
Berikut ini disajikan bagan alur Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan hubungan dan keterkaitan antara Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD dengan Dokumen Perencanaan tingkat atasnya.



1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan yang menyangkut kemana biduk sebuah organisasi akan dikayuh dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, adaptif, antisipatif, inovatif dan produktif. Pada hakikatnya, pembentukan visi bersama adalah penggalian gambaran bersama mengenai masa depan yang dilandasi rasa komitmen kebersamaan.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah *Mewujudkan kehidupan Masyarakat Flores Timur yang Aman, Tentram, Tertib, Damai dan Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.*



2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan Visi diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu merumuskan Misi sebagai bentuk upaya-upaya yang konkrit sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mampu menjalankan semua tugas dan fungsi yang di emban secara tegas, bijak dan humanis serta tanpa pandang bulu.
2. Meningkatkan kesadaran, disiplin dan peran serta Masyarakat Flores Timur dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Menegakan semua produk hukum yang berlaku di Daerah terutama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Membenahi dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang yang ada serta menggunakannya secara optimal.

3. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang.

Rumusan tujuan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Disiplin dan Kualitas aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penagakan produk hukum daerah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang secara bertahap dan berkelanjutan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan.
3. Membina dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan penyakit sosial lainnya serta menjaga kondisi kamtramtibmas di wilayah.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor.
5. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batas waktu tertentu. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur menggambarkan hal yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dari tujuan.

- 1] Untuk mencapai tujuan ” Meningkatkan Disiplin dan Kualitas aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penagakan produk hukum daerah sesuai tugas dan fungsi yang diemban” ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.1 Meningkatkan Disiplin dan Kualitas aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penagakan produk hukum daerah sesuai tugas dan fungsi yang diemban”	1.1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	1.1.1 Tersedianya Aparatur yang berkualitas dan berpotensi

- 2). Untuk mencapai tujuan ” Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang secara bertahap dan berkelanjutan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan. ” ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.2 Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang secara bertahap dan berkelanjutan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan.	1.2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang	1.2.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi

- 3) Untuk mencapai tujuan ” *Meningkatkan Koordinasi dan kerja sama lintas sektor*” ditetapkan **sasaran dan indikator sebagai berikut:**

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1.5	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor	1.5.	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku	1.5.1	Menurunnya Pelanggaran PERDA Tingkat

- 4) Untuk mencapai tujuan ”**Meningkan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**” ditetapkan **sasaran dan indikator sebagai berikut:**

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1.5	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.5.	Menurunkan Tindak Kriminalis Masyarakat	1.5.1	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN
MISI I : Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mampu menjalankan semua tugas dan fungsi yang di emban secara tegas, bijak dan humanis serta tanpa pandang bulu.		
1.	Meningkatkan Disiplin dan Kualitas aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penegakan produk hukum daerah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.	<i>Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur</i>
MISI II : Meningkatkan kesadaran, disiplin dan peran serta Masyarakat Flores Timur dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang secara bertahap dan berkelanjutan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan	Peningkatan Prasarana dan

	tugas di lapangan.	Sarana Penunjang
MISI III : Menegakan semua produk hukum yang berlaku di Daerah terutama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
1.	<i>Membina dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan penyakit sosial lainnya serta menjaga kondisi kamtramtibmas di wilayah.”</i>	Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban
MISI IV : Membenahi dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang yang ada serta menggunakannya secara optimal.		
1.	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sector Membina dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan penyakit sosial lainnya serta mengganggu kondisi kamtramtibmas di wilayah.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku

4. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari 4 Misi, 4 tujuan dan 5 sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan Program-program. Pada Perencanaan Strategis kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

Kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi Untuk Mencapai Sasaran “Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur”.

No.	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur	• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2) Strategi Untuk mencapai Sasaran “Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang”

No.	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memenuhi Standar	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan

	Operasional		4. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan Komponen Insulasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Teknis Perkantoran
	Meningkatnya Dokumen-dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya Dokumen-dokumen pelaporan Capaian Kinerja tepat waktu.	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. <i>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</i> 3. <i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i> 4. <i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i> 5. <i>Pengadaan Mebeleur</i> 6. <i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i> 7. <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> 8. <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.</i>
	Meningkatnya Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	<i>Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (Kebakaran)</i>

- 3) Strategi Untuk Mencapai Sasaran "Peningkatan Peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban.

No.	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	• Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan Kegiatan : Pelatihan pengembangan kapasitas Linmas

- 4) Strategi Untuk Mencapai Sasaran “Peningkatan Kepatuhan Masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku.

No.	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Penurunan tindak criminal	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal Pengamanan dan Penegakan PERDA

- 5) Strategi Untuk Mencapai Sasaran “Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pencegahan tindak Kriminal

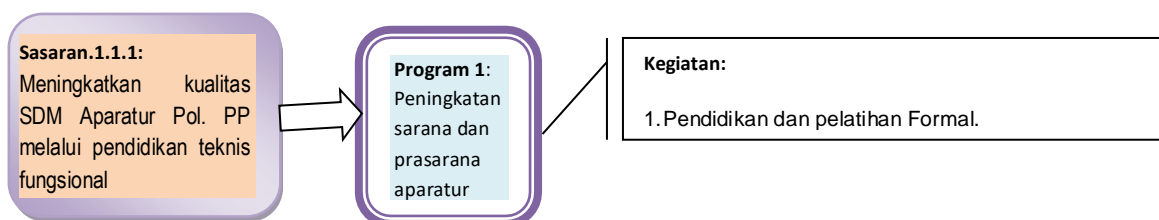
No.	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Mengamankan Semua Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Melakukan Pengamanan Mengurangi Tindak Kriminalitas	I. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Gabungan 2. Pengamanan Pilkada 3. Fasilitas BKO Tenaga keamanan
2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan koordinasi pengamanan dengan aparat keamanan lainnya maupun keamanan swakarsa yang ada	II Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian keamanan Lingkungan.

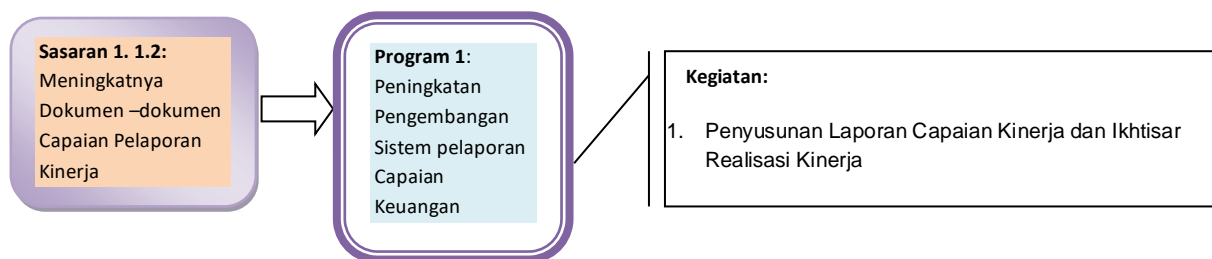
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Berbagai strategi kebijakan dan program telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Flores Timur.

Penetapan Kinerja Tahunan 2019 untuk masing-masing tujuan beserta strategi pencapaiannya oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai tujuan ” **Meningkatkan disiplin dan kualitas aparatur Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan keteriban melalui pengawas dan penegakan produk hukum daerah sesuai dengan fungsi yang diemban** ” ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:
ditetapkan 2 sasaran, 2 program dan 2 kegiatan dengan indikator sebagai berikut





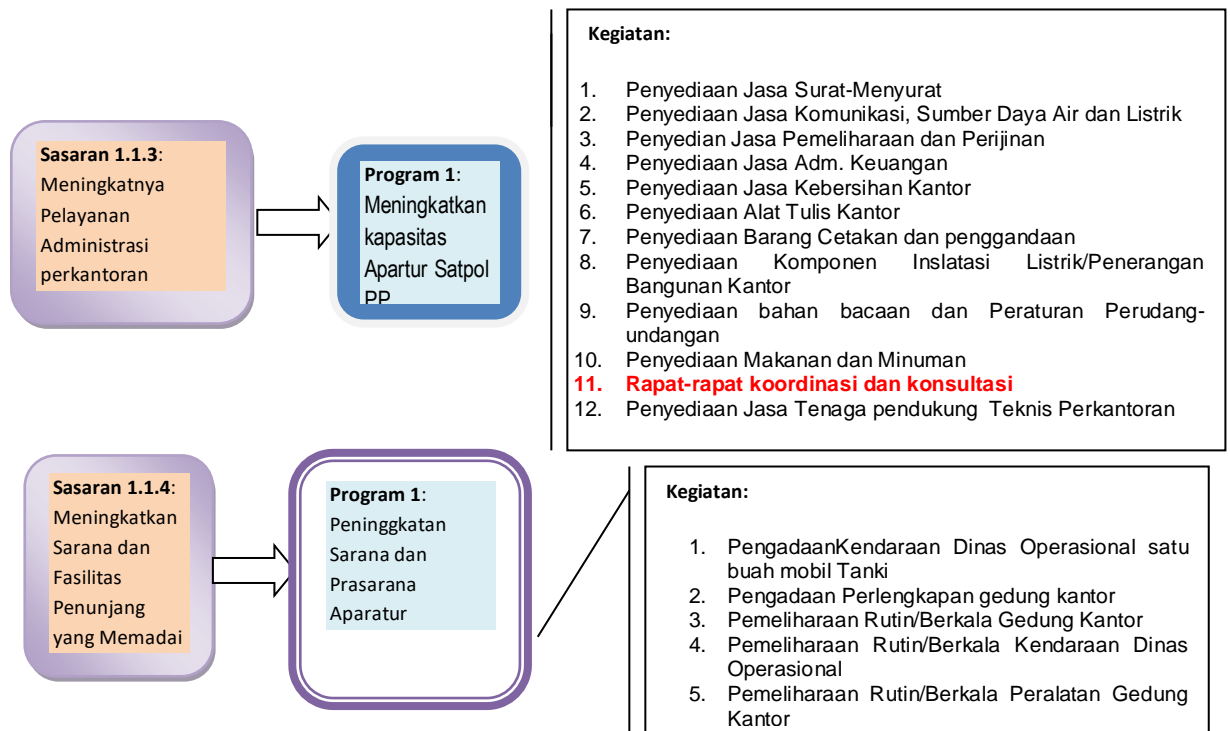
Kinerja masing-masing kegiatan pada **SASARAN 1.1.1,dan 1.1.2** meliputi target *output, outcome* dan anggaran pada tahun 2019 ditetapkan indikator sebagaimana tabel berikut:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TARGET (RP)
	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pol. PP melalui pendidikan teknis fungsional Kegiatan : 1.Pendidikan dan Pelathan Formal	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6 orang	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pol. PP	100%	95.839.000,-

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TARGET (RP)
	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1.Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Sat Pol PP	16 Buku	Meninggkatnya Kinerja SKPD	100%	51.837.700,-

2) Untuk mencapai tujuan ” **Meningkatkan Prasarana dan sarana penunjang secara bertahap dan kelanjutan demi mendahulukan optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan** ” ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

ditetapkan 3 sasaran, 3 program dan 19 kegiatan dengan indikator sebagai berikut:



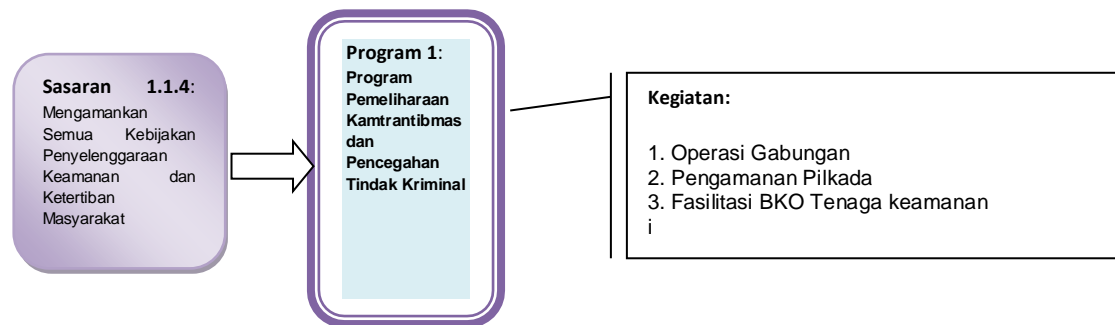
Kinerja masing-masing kegiatan pada **SASARAN 1.1.1, 1.1.2 dan 1.1.3** meliputi target *output*, *outcome* dan anggaran pada tahun 2019 ditetapkan indikator sebagaimana tabel berikut:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TARGET (RP)
	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah materai, perangko dan	210 (materai 200 lbr)	% Meningkatnya Keabsaan dokumen	100 %	1.800.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekwensi/jasa pemakaian telephon,	12 (12 bulan)	% Jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telp	100 %	19.200.000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	12 (12 bln)	% Jasa pemeliharaan dan Perijinan	100 %	10.070.000
4. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Jasa penyelesaian administrasi	6 (6 orang, 12 bln)	% Pelayanan administrasi Keuangan	100 %	35.550.000
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	12 bln (14 jenis alat kebersihan, 12 bln)	Tercitanya kebersihan kantor	100 %	2.258.000
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah peralatan tulis	12 bln (47 jenis atk, 4 Jenis)	% Kegiatan Rutin yang diselesaikan tepat waktu	100 %	37.839.125

	kantor	kelengkapan komputer 12 bln)			
7..Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	12bln (jilid 350 bk dan penggandaan : 18.020. Imbr, 12 bln)	% Kegiatan Rutin yang diselesaikan tepat waktu	100 %	14.845.250
8..Penyediaan Komponen Insulasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahKomponen Bangunan dan Listrik	12bln (8 jenis alat Listrik, 12 bln)	% Kegiatan Rutin yang diselesaikan tepat waktu	100 %	3.879.000
9..Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	12bln (3 jenis Bacaan, 12 bln)	% pemahaman dan pengetahuan	100 %	3.680.000
10..Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekwensi makan dan minum rapat	12 (12 bulan)	% Kegiatan Rutin yang diselesaikan tepat waktu	100 %	30.000.000
11..Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Frekwensi rapat koordinasi dan	12bln (11 kl dlm daerah & 12 kl Luar daerah)	Terlaksananya Koordinasi dalam , Luar daerah dan	100 %	180.400.750
12..Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung Teknis Perkantoran.	12 (12bln)	% Meningkatkan Kinerja Instansi	100 %	948.805.560
Meningkatkan Sarana dan Fasilitas Penunjang yang Memadai Kegiatan :					
1.Pelengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	5 unit (4 unit Kipas angin, 1 unit AC)	% Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat	100%	5.137.500
2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		% Peralatan Gedung Kantor yang memenuhi syarat	100%	27.080.000
3 Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur	30 kursi spon	% Meubeleur yang memenuhi syarat	100%	20.775.000
4.PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala Gedung Ktr	12 Bln (21 Jenis, 12 bln)	% Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat	100%	30.583.000
5.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	12 Bln (11 jenis , 12bln)	% Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat	100%	52.732.000
6.PemeliharaanRutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala	12 Bln (5 jenis, 12 bln)	% Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat	100%	38.180.000

3) Untuk mencapai tujuan ” **Membina dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan penyakit social lainnya serta menjaga kondisi Kantantibmas di wilayah** ” ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

ditetapkan 1 sasaran, 1 program dan 4 kegiatan dengan indikator sebagai berikut:

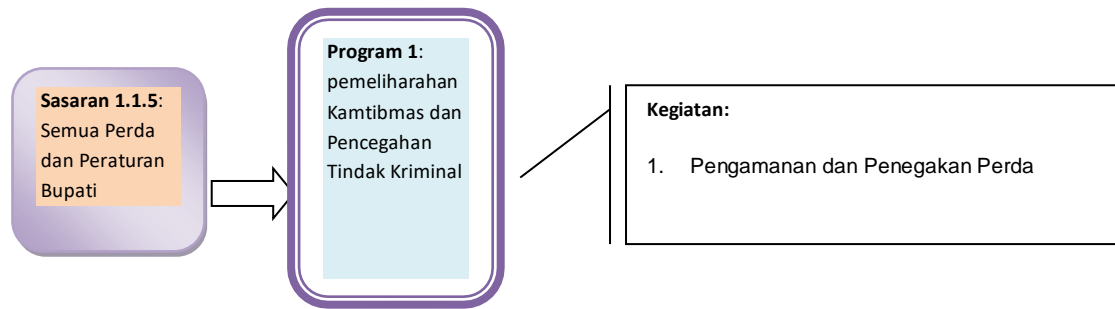


Kinerja masing-masing kegiatan pada **SASARAN 4.1.1** meliputi target *output*, *outcome* dan anggaran pada tahun 2019 ditetapkan indikator sebagaimana tabel berikut:

SASARAN /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		INDIKATOR KINERJA
	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	TARGET (RP)
Mengamankan Semua Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kegiatan :					
1.Operasi Gabungan	Frekwensi kegiatan Operasi Gabungan	12 Bln (Operasi Psk 2 KI)	% Menurunnya Tindak Kriminal dalam Masyarakat	100%	53.702.250.
2.Pengamanan Pilkada	Frekwensi Pengamanan Pilkada	12 Bln	% Terkendalinya Kondisi Keamanan Wilayah	100%	156.448.500
3.Fasilitasi BKO Tenaga keamanan	Personil Bantuan Keamanan Operasi	12 Bln	Terkendalinya Kondisi Keamanan Wilayah	100%	181.412.075

4) Untuk mencapai tujuan ” **Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor** ” ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

ditetapkan 1 sasaran, 1 program dan 1 kegiatan dengan indikator sebagai berikut:

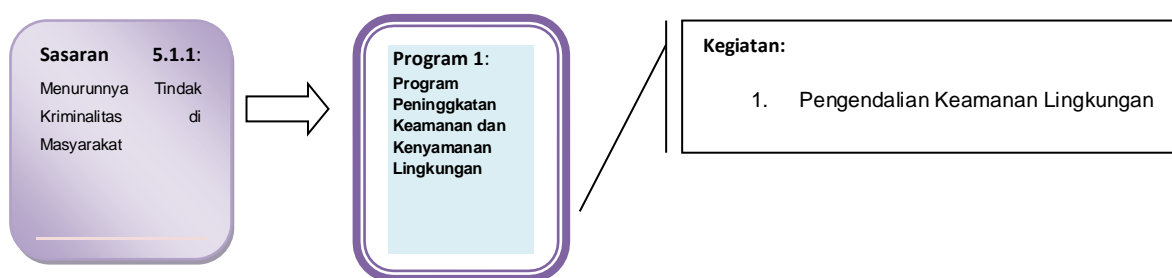


Kinerja masing-masing kegiatan pada **SASARAN 2.1.1** meliputi target *output*, *outcome* dan anggaran pada tahun 2019 ditetapkan indikator sebagaimana tabel berikut:

SASARAN /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		INDIKATOR KINERJA
	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	TARGET (RP)
Semua Perda dan Peraturan Bupati Kegiatan : 1. Pengamanan Dan Penegakan Perda	Jumlah Penegakan Perda	3 Kegiatan (Operasi Pajak Daerah, Perda No.13 tahun 2011 & Sosialisasi Perda di 19 Kecamatan	Menigggkatnya Kepatuhan dan Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	100%	77.680.500

5) Untuk mencapai tujuan " **Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan** " ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut:

ditetapkan 1 sasaran, 1 program dan 1 kegiatan dengan indikator sebagai berikut:



Kinerja masing-masing kegiatan pada **SASARAN 5.1.1** meliputi target *output*, *outcome* dan anggaran pada tahun 2019 ditetapkan indikator sebagaimana tabel berikut:

SASARAN /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		INDIKATOR KINERJA
	URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	TARGET (RP)
Menurunnya Tindak Kriminalitas di Masyarakat Kegiatan :					
1. Pengendalian keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pengaman	8 Pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa, Korpus Kristi, Prosesi Sanjuan, Natal, Tutup Tahun, PNS dan Pelajar	Aktifitas Pemerintah dan Masyarakat Berjalan Lancar	100%	227.570.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TAHUN PEMBANDING

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja SKPD Satuan polisi Pamong Praja adalah Renstra, RKT 2019 dan Penetapan Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam tahun 2019 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur menetapkan 5 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari
2. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Meningkatkan sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja yang lebih profesional.
4. Meningkatkan dan mengembangkan keterpenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
5. Membantu dan memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin bagi Kepala Daerah dan ikut serta menyukseskan otonomi Daerah.

Pencapaian 5 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Prosen (%)
1	2	3	4	5
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah materai, perangko dan Benda Pos Lainnya	300 (materai 300 lbr)	300 (materai 000 lbr)	100%
	Frekwensi/jasa pemakaian telephon, air dan listrik	12 (Rekening penggunaan telp, air dan listrik, 12 bulan)	12 (Rekening penggunaan telp, air dan listrik, 12 bulan)	100%
	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	12 (2 unit roda 6, satu unit roda 4, dan 13 unit roda dua, 12 bln)	12 (2 unit roda 6, satu unit roda 4 dan 13 unit roda dua, 12 bln)	100%
	Jasa penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi barang	6 (6 orang, 12 bln)	6 (6 orang, 12 bln)	100%
	Jumlah peralatan kebersihan kantor	12 bln (12 jenis alat kebersihan, 12 bln)	14 (12 jenis alat kebersihan, 12 bln)	100%
	Jumlah peralatan tulis kantor	12bln (47 jenis atk, 4 Jenis kelengkapan komputer 12 bln)	47 (47 jenis atk, 4 Jenis kelengkapan komputer 12 bln)	100%
	Jumlah cetakan dan penggandaan	12bln (jilid 350 bk dan penggandaan : 18.020. lmr, 12 bln)	40.000 (jilid 450 bk dan penggandaan : 40.000. lmr, 12 bln)	100%
	Jumlah Komponen Bangunan dan Listrik	12bln (8 jenis alat Listrik, 12 bln)	8 (8 jenis alat Listrik, 12 bln)	100%
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12bln (3 jenis Bacaan, 12 bln)	12bln (3 jenis Bacaan, 12 bln)	100%
	Frekwensi makan dan minum rapat	12 (12 bulan)	12 (12 bulan)	100%
	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12bln (12 kl Luar daerah)	12bln (12 kl Luar daerah)	100%
	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 (11 kl dlm daerah)	12 (11 kl dlm daerah)	100%
	Jumlah tenaga pendukung dan	73 (70 orang, 12 bln) 1	71 (70 orang, 12 bln) 1	97.26%
Tersediannya Saran dan Prasarana Aparatur	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	1 unit (1 unit AC)	1 unit (1 unit AC)	100%
	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	12 Bln (20 Jenis, 12 bln)	12 Bln (20 Jenis, 12 bln)	100%

	kantor			
	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / operasional	12 Bln (7 jenis , 12bln)	12 Bln (7 jenis , 12bln)	100%
	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bln (3 Jenis,12 bln)	12 Bln (3 Jenis,12 bln)	100%
Tersedianya dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen	16 (16Buku)	16 (16Buku)	100%
Tersedianya Aparatur sat Pol PP yang terlatih	Jumlah Aparatur	6 org 6 org Bimtek Damkar	6 org 6 org Bimtek Damkar	100%
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pengamanan	7 Kegiatan : Pengamanan Lebaran,Idul Adha,Semana Santa,Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan,Natal,Tutup Tahun	7 Kegiatan (Pengamanan Lebaran,Idul Adha,Semana Santa,Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan,Natal,Tutup Tahun)	100%
Meningkatnya kamtrantibmas & Menurunnya Tindak kriminalitas	Jumlah Pengamanan Pilkada	4 kegiatan (Pilpres, Pileg,Pemilihan DPD dan Pilkadaes)	4 kegiatan (Pilpres, Pileg,Pemilihan DPD dan Pilkadaes)	100%
	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda	3 Perda dan 1 Intruksi Bupati Kdh Tk.II.(Perda No. 22 thn 2011 ttg Pajak Daerah, Perda No 4 thn 2015 ttg Usaha Pariwisata, Perda no 16 thn 2015 ttg Ketertiban Umum Daerah Flores Timur serta Intruksi Bupati KDH Tk. II Flores Timur No 2 thn 1997 ttg Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pantai)	3 Perda dan 1 Intruksi Bupati Kdh Tk.II.(Perda No. 22 thn 2011 ttg Pajak Daerah, Perda No 4 thn 2015 ttg Usaha Pariwisata, Perda no 16 thn 2015 ttg Ketertiban Umum Daerah Flores Timur serta Intruksi Bupati KDH Tk. II Flores Timur No 2 thn 1997 ttg Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pantai)	100%
	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan (5 org PSK di Planet dipulangkan ke kampung halamannya)	2 Kegiatan (Operasi PSM dan Penertiban Pelajar)	2 Kegiatan (Operasi PSM dan Penertiban Pelajar)	100%
	Jumlah Kegiatan BKO Penertiban pasar Larantuka dan Pasar Waiwerang serta Pemadaman kebakaran di 3 titik yakni 1 bh rumah tinggal, 1 bh mesin PLN dan 1 lahan pertanian.	2 Kegiatan (Penertiban Pasar dan Penanggulangan Kebakaran)	2 Kegiatan (Penertiban Pasar dan Penanggulangan Kebakaran)	100%

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	16 buah APAR	16 buah APAR	100%
--	---------------------------------------	--------------	--------------	------

2. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Tahun 2019	REALISASI Tahun 2018	(%) thn 2018	(%) thn 2019
1	2	4	5	6	7
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah materai, perangko dan Benda Pos Lainnya	300 (materai 300 lbr)	300 (materai 300 lbr)	100%	100 %
	Frekwensi/jasa pemakaian telephon, air dan listrik	12 (12 bulan)	12 (12 bulan)	92,03%	100 %
	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	12 (12 bln)	12 (12 bln)	100%	100 %
	Jasa penyelesaian administrasi keuangan dan administrasi barang	6 (6 orang, 12 bln)	6 (6 orang, 12 bln)	100%	100 %
	Jumlah peralatan kebersihan kantor	14 (14 jenis alat kebersihan, 12 bln)	14 (14 jenis alat kebersihan, 12 bln)	100%	100 %
	Jumlah peralatan tulis kantor	47 (47 jenis atk, 4 Jenis kelengkapan komputer 12 bln)	47 (47 jenis atk, 4 Jenis kelengkapan komputer 12 bln)	100%	100 %
	Jumlah cetakan dan penggandaan	40.000 (jilid 450 bk dan penggandaan : 40.000. lmr, 12 bln)	40.000 (jilid 450 bk dan penggandaan : 40.000. lmr, 12 bln)	100%	100 %
	Jumlah Komponen Bangunan dan Listrik	8 (8 jenis alat Listrik, 12 bln)	8 (8 jenis alat Listrik, 12 bln)	100%	100 %
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 bln (3 jenis Bacaan, 12 bln)	3 (3 jenis Bacaan, 12 bln)	100%	100 %
	Frekwensi makan dan minum rapat	12 (12 bulan)	12 (12 bulan)	100%	100 %
	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln (12 kl Luar daerah)	12 (12 bln)	100%	100 %
	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 (11 kl dlm daerah)	12 (12 bln)	100%	100 %
	Jumlah tenaga pendukung dan	71 (71 orang, 12 bln) 1	73 (73 orang, 12 bln) 1	100%	100 %

Tersediannya Saran dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 (Satu Unit Mobil Tanki)	1 (Satu unit Mobil Tanki)	100%	100 %
	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	1 unit (1 unitv AC)	1 unit (1 unitv AC)-	100%	
	Jumlah peralatan gedung kantor	6 (3 laptop,2 Printer,1 UPS)	6 (3 laptop,2 Printer,1 UPS)	100%	100 %
	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala Gedung Ktr	12 Bln (14 Jenis,12 bln)	14 (14 Unit ,12bln)	100%	100 %
	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	12 Bln (7 jenis , 12bln)	12 (7 Jenis ,12bln)	100%	100 %
	Frekwensi pemeliharaan rutin/berkala	12 Bln (3 Jenis,12 bln)	12 (3 Jenis ,12bln)	100%	100 %
Tersedianya Aparatur sat Pol PP yang terlatih	Jumlah Aparatur	6 org 6 org Bimtek Damkar	7 (1 org Bimtek PPNS,4 org basis akrua,2 penegakan Perda)	100 %	100 %
Tersedianya dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen	16 (16Buku)	16 (16Buku)	100%	100 %
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pengamanan	7 Kegiatan : Pengamanan Lebaran,Idul Adha,Semana Santa,Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan,Natal,Tutup Tahun	7 Kegiatan : Pengamanan Lebaran,Idul Adha,Semana Santa,Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan,Natal,Tutup Tahun	100%	100 %
Meningkatnya kamtrantibmas & Menurunya Tindak kriminalitas	Jumlah Pngamanan Pilkada	4 kegiatan (Pilpres, Pileg,Pemilihan DPD dan Pilkada)	2 Kegiatan (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu Propinsi NTT)	100%	100 %
Meningkatnya kamtrantibmas & Menurunya Tindak kriminalitas		3 Perda dan 1 Intruksi Bupati Kdh Tk.II.(Perda No. 22 thn 2011 ttg Pajak Daerah, Perda No 4 thn 2015 ttg Usaha Pariwisata, Perda no 16 thn 2015 ttg Ketertiban Umum Daerah Flores Timur serta Intruksi Bupati KDH Tk. II Flores Timur No 2 thn 1997 ttg Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pantai)	3 Perda dan 1 Intruksi Bupati Kdh Tk.II.(Perda No. 22 thn 2011 ttg Pajak Daerah, Perda No 4 thn 2015 ttg Usaha Pariwisata, Perda no 16 thn 2015 ttg Ketertiban Umum Daerah Flores Timur serta Intruksi Bupati KDH Tk. II Flores Timur No 2 thn 1997 ttg Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pantai)	100%	100 %
	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda				
	Jumlah kegiatan Operasi	2 Kegiatan (Operasi PSM dan Penertiban Pelajar)	4 (Operasi PSK 4KI)	100%	100 %
	Jumlah Kegiatan BKO	2 Kegiatan (Penertiban Pasar dan	2 Kegiatan (Penertiban Pasar dan		

		Penanggulangan Kebakaran)	Penanggulangan Kebakaran)	100%	100 %
--	--	---------------------------	---------------------------	------	-------

3. Realisasi Kinerja Tahun 2019 s/d capaian kinerja jangka menengah / dokumen perencanaan Strategis organisasi.

Terbaca pada Rentra Sat Pol PP Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Tahun ke lima (2016) Periode RPJMD	Target Tahun ke lima (2016) Periode RPJMD	Realisasi tahun 1 (2017)	Realisasi tahun 2 (2018)
		Tahun 0	Tahun 1 (2017)	Tahun 1 (2017)	Tahun 1 (2017)	Tahun 2 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
1.	Aparatur Pol. PP yang mengikuti diklat teknis : -	54 Orang	60 Orang	7 Orang	7 orang (Diklat PPNS 1 org,Bimtek Penegakan Perda 2 org, Diklat keuangan Basis Akrua 4 org)	14 orang (Bimtek LAKIP, Bimtek Keuangan .
2.	Tingkat Koordinasi	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	16 SKPD (BPBD,SOSIAL,UPTSP,PU TAMBEN,DINKES,PPO,CAMAT LTK,DPPKAD,EKONOMPEMB,HUKUM,INSPEKTORAT, PRINGDAG,PARIWISATA,PERHUBUNGAN,BKD,BAPEDA)	16 SKPD (BPBD,SOSIAL,UPTSP,PU TAMBEN,DINKES,PPO,CAMAT LTK,DPPKAD,EKONOMPEMB,HUKUM,INSPEKTORAT, PRINGDAG,PARIWISATA,PERHUBUNGAN,BKD,BAPEDA
3.	Sarana dan prasarana penunjang	7 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis (1Unit Kendaraan Roda 6 / Dalmes)	I unit Mobil Pemadam Kebakaran. -

	tugas pokok dan fungsi					
4	Menurunnya tingkat pelanggaran PERDA	13 kasus	5 kasus	5 kasus	77 Kasus (dari 83 kasus yg di lap di ketemuan ,77 kasus bisa di selesaikan terbaca pada SPM)	129 Kasus (dari 127 kasus yg di lap di ketemuan ,102 kasus bisa di selesaikan terbaca pada capaian SPM 2017)
5	Tindak kriminalitas Menurun	73 Kasus	40 Kasus	40 Kasus	51 Kasus (Berdasarkan Rekapitulasi Gangguan Trantibum Kec.dan Kab)	43 Kasus (Berdasarkan Rekapitulasi Gangguan Trantibum Kec.dan Kab)

4. Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional.

Untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. penetapan SPM. Dalam pencapaian yang dilaporkan adalah

1. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - c. Cakupan rasio petugas linmas
 - d. Cakupan rasio jumlah pol.pp
2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

INDIKATOR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

KAB. / KOTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2012

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Pemeliharaan Keten- traman & Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	2019	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman	3 x patrol dlm sehari	2019	Satuan Polisi Pamong Praja

		masyarakat			
		3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2019	Satuan Polisi Pamong Praja

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2018	Realisasi Daerah 2019	Keterangan
1	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	79,07	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan per jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patrol dlm sehari	593.06	Kelompok patroli dikali 3 per jumlah kecamatan
		3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	0,34	Per jumlah RT

5. Analisa penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa Faktor penyebab Penurunan Kinerja yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- Dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya Aparatur yang tersedia serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki juga merupakan persoalan tersendiri dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur
- Selain persoalan di atas persoalan yang juga turut mempengaruhi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah belum memadainya pendanaan karena minimnya kemampuan keuangan Daerah .

Alternatif Solusinya antara Lain :

1. Kesempatan bagi SDM aparaturnya untuk meningkatkan kualitas dan Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana secara memadai bagi pelaksanaan berbagai kegiatan ;
2. Peningkatan sarana prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan dan Motivasi, kreativitas dan disiplin kerja pegawai serta penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta meningkatkan pengawasan melekat atasan terhadap bawahan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Sebagai Aparatur Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja secara umum, dan Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur memiliki kewenangan yang luas dalam menegakan berbagai Peraturan Daerah yang ada oleh karena itu seluruh SKPD yang ada hendaknya membangun koordinasi yang lebih intens dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Tugas Pelayanan SKPD-nya sehingga tidak memberikan kesan timbal balik yang kurang baik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur akan membangun dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya maupun intansi teknis terkait dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dibidang keamanan dan ketertiban. Disamping itu, juga senantiasa membina hubungan dan koordinasi yang lebih efektif dengan aparat Banpol. PP yang ada sehingga persoalan-persoalan kamtramtibmas yang muncul/timbul di suatu wilayah Kecamatan sedini mungkin dapat diatasi dan tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

7. Analisa Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program SKPD kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan terdiri dari 6 Program dengan 26 Kegiatan, dari 6 Program terdapat 2 Program / 6 Kegiatan Prioritas disusun berdasarkan rumusan Sasaran dari kelima misi Lima Pembangunan Flores Timur periode 2017 – 2022 “ *Revormasi Birokrasi* “

Program / kegiatan dianggap Menunjang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat di rincikan sebagai berikut :

1. Program Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan :

- 1.1. Pengamanan Penegakan Perda (*Menurunkan Tingkat Pelanggaran Perda*)
- 1.2. Pengamanan Pilkada (*Menurunkan Pelanggaran Pilkada*)
- 1.3. Operasi gabungan(*Menurunkan Tindak Kriminal*)

- 1.4. Fasilitas Bantuan Kendali Operasional (BKO) (*Menurunkan Tindak Kriminal*)
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - 2.1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional (*Peningkatan Biaya BBM dapat Meningkatkan Frekwensi Patroli Rutin 3 Kali dalam Sehari*)
3. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan :
 - 3.1. Pengendalian Keamanan Lingkungan (*Menurunkan Tindak Kriminal*)
- a. Program / kegiatan dianggap Menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat di rincikan sebagai berikut :
 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
 - 1.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (*Mininnya diklat Bagi Aparatur Pol PP*)

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang diberikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dalam tahun anggaran 2018 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019. Disamping itu, pemanfaatan dan penggunaan anggaran dimaksud juga semakin menunjukkan adanya peningkatan sesuai dengan peruntukannya dimana semua program yang direncanakan dalam Tahun Anggaran 2019 dapat dilaksanakan.

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

SASARAN PERTAMA :

SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Menigkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

a Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 98.839.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 98.704600,-
- Prosentase : 99,86 %

b Output : Terselenggaranya Bimtek Peningkatan SDA

a. Outcome: Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Kondusif

Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan

1	<i>Terlaksanannya Diklat Damkar 6 org</i>
2	<i>Terlaksanannya Diklat Anti Huru Hara 30 org</i>

2. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 51.837.700,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 51.791.850,-
- Prosentase : 99.91%

b. Output : Tersusunya LAKIP, RKA, DPA, Laporan Keuangan, LPPD, LKPD.

c. Outcome : Tersedianya Dokumen

SASARAN KEDUA :

SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
<i>Peningkatan Prasarana dan sarana penunjang</i>	Pelayanan Administrasi perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan 4. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12. Penyediaan Jasa Tenaga Pedukung Teknis Perkantoran
<i>Peningkatan Peran</i>	Peningkatan Sarana dan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

	serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban	Prasarana Aparatur	2. . Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
			3. Pengadaan Meubeler
			4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
			6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana {kebakaran}	1. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Rincian :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

2. Penyediaan jasa surat menyurat.

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp 1.800.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 1.797.500,-
- Prosentase : 98,87%

b. Output : Tersedianya perangko/meterai dan benda pos lainnya

c. Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp 19.200.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 15.007.200,-
- Prosentase : 78,16%

b. Output : Terbayarnya rekening telp, listrik dan air

c. Outcome : Meningkatnya pelayanan komunikasi, penerangan dan Sanitasi.

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan.

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp.10.070.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.10.023.750,-
- Prosentase : 99,54%

b. Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

c. Outcome : Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp.35.559.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.35.559.000,-
- Prosentase : 100 %

b. Output : Tersedianya honorarium pengelola keuangan

c. Outcome : Terbayarnya honorarium pengelola keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 2.838.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 2.836.000,-
- Prosentase : 99,91 %

b. Output : Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor

c. Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor.

- a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran :Rp. 37.639.125,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 37.615.500,-
 - Prosentase : 99,93 %
- b. Output : Tersedianya alat tulis kantor
- c. Outcome : Meningkatnya aktivitas kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 14.845.250,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 14.845.250,-
 - Prosentase : 100 %
 - b. Output : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
 - c. Outcome : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 3.879.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 3.879.000,-
 - Prosentase : 100 %
 - b. Output : Tersedianya komponen instalasi listrik
 - c. Outcome : penerangan kantor memadai
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 3.660.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 2.865.000,-
 - Prosentase : 78,28 %
 - b. Output : Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - c. Outcome : meningkatnya pengetahuan aparatur
10. Penyediaan makanan dan minuman.
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 30.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 27.020.000,-
 - Prosentase : 90,07 %
 - b. Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk PNS
 - c. Outcome : Kelancaran kegiatan kantor.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi .
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 180.400.750,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 180..303.800,-
 - Prosentase : 90,95%
 - b. Output : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - c. Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan

1	<i>Terlaksananya Pengamanan Aset Aset pemerintah.</i>
2	<i>Terlaksananya Kegiatan Monitoring ,Evaluasi Kinerja Banpol PP di 19 Kecamatan</i>
3	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepala Sat Pol PP Tingkat Propinsi di Kupang.</i>
4	<i>Terlaksananya Sinergiritas Program Kegiatan Sat Pol PP Kabupaten Flores Timur dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.</i>

12. Tenaga Pendukung teknis Perkantoran

- a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 948.805.560,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 924.600.000,-
 - Prosentase : 97,48%

- b. Output : Tersedianya Anggaran untuk tenaga Kontrak /Honorir
- c. Outcome : Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak / Honorir

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. *Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*

- a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 5.137.500,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 4.433.000,-
 - Prosentase : 86,29 %
- b. Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
- c. Outcome : Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas
- d.

2. *Pengadaan peralatan gedung kantor.*

- a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 27.080.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 26.613.500,-
 - Prosentase : 86,29%
- b. Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
- c. Outcome : Terciptanya Kenyamanan Kerja

3. *Pengadaan Meubeleur.*

- b. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 20.775.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 13.500.000,-
 - Prosentase : 66,47%
- d. Output : Tersedianya Meubeleur
- e. Outcome : Terciptanya Kenyamanan Kerja

4. *Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.*

- a..Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 30.583.000-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 30.572.000,-
 - Prosentase : 99,96%
- b. Output : Terpeliharanya Bangunan Gedung kantor
- c. Outcome : Meningkatnya Kelestarian Gedung Kantor

6. *Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.*

- a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 62.722.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 62.680.000 ,-
 - Prosentase : 99,92 %
- a. Output : . Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
- b. Outcome : Kegiatan Operasional berjalan lancar.

7. *Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.*

- a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 8.800.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 5.950.000,-
 - Prosentase : 69,19
- b.Output : Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

c. Outcome

: Kegiatan Perkantoran berjalan dengan baik dan lancar

8. SASARAN KETIGA :

NO.	SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
1	Peningkatan Peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Operasi Gabungan
			2. Pengamanan Pilkada
			3. Fasilitas BKO Tenaga keamanan
			4. Pengwalan Pejabat dan Tamu-Tamu Penting

Rincian :

1. *Operasi Gabungan.*

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 53.702.250,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 53.120.000,-
- Prosentase : 98,93 %

b. Output : Terlaksananya Operasi pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.

c. Outcome : Menurunnya praktek prostitusi.

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<i>Terlaksananya Operasi Penyakit Sosial Masyarakat di beberapa Kafe dan beberapa Kos – kosan yang di duga sebagai lokasi Prostitusi.</i>
2	<i>Terlaksananya Operasi Gabungan dalam rangka pemantauan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat</i>

2. *Pengamanan Pilkada*

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 156.448.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 153.838.500,-
- Prosentase : 98,33%

b. Output : Terlaksananya Pengamanan Pilkada

c. Outcome : Terpenuhinya keamanan dan kenyamanan pelaksanaan Pilkada

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<i>Pengamanan kampanye untuk ke enam paket di 19 kecamatan</i>

3. Fasilitas Bantuan Kendali Operasional (BKO)

- a. Input Dana
- Alokasi Anggaran : Rp. 181.142.075,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 181.217.075,-
 - Prosentase : 99,89%.
- b. Output : Terlaksananya Fasilitas BKO Tenaga Keamanan
- c. Outcome : Terpenuhinya Fasilitas BKO Tenaga Keamanan

4. Pengawasan Pejabat Daerah dan Tamu – Tamu Penting

- b. Input Dana
- Alokasi Anggaran : Rp. 62.715.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 61.080.000,-
 - Prosentase : 97,01%.
- b. Output : Terlaksananya Pengawasan Pejabat Daerah dan Tamu-Tamu Penting
- c. Outcome : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Para Pejabat dan Tamu – Tamu penting .

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<i>Terlaksananya Pengawasan Pejabat daerah (Bupati, Wakil Bupati Flores Timur, Sekretaris Daerah Flores Timur serta Pejabat daerah lainnya)</i>
2	<i>Terlaksananya pengawasan Pejabat negara.</i>

SASARAN KE EMPAT

SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku	pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Pengamanan dan Penegakan Perda

Rincian :

1. Pengamanan dan penegakan Perda.

a..Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 77.680.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 77.640.100,-
- Prosentase : 99,97 %

b..Output : Terlaksananya Pengamanan dan Penegakan Perda.

c..Outcome : Meningkatnya PAD.

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<i>Pembinaan dan pengawasan Perda :</i> <i>a. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 22 Tahun 2011 tentang pajak Daerah</i> <i>➤ Hotel : Terlaksananya Operasi terhadap Hotel dan Penginapan dengan rincian 13</i>

	<p><i>Hotel,3 Losmen dan 6 Penginapan sudah melunasi 13 Hotel,3 Losmen dan 6 Penginapan .</i></p> <p>➤ <i>Rumah Makan : Terlaksananya Operasi terhadap 107 (Rumah Makan ,Restoran yang tersebar di wilayah kecamatan Larantuka,Adonara Timur dan Kecamatan Wulanggintang yang sudah melunasi sebanyak 90 sedangkan 3 rumah makan belum Melunasi dan 14 warung makan / depot Tutup.</i></p> <p><i>b. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 04 Tahun 2015 Tentang Surat Ijin Pariwisata</i></p> <p><i>c. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 07 Tahun 2007 tentang Surat Ijin Tempat Usaha</i></p> <p><i>d. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 13 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu</i></p> <p><i>e. Monitoring Instruksi Bupati KDH TK.II Nmr : 02 Tahun 1997 tentang Pengamanan,Pagawasan dan Pengendalian Kawasan Pantai</i></p> <p><i>f. Operasi Pembinaan dan Pengawasan Perda no 07 tahun 2007 tentang surat ijin Tempat Usaha</i></p> <p><i>c. Dari hasil pelaksanaan tugas dalam tahun 2017 terdapat 784 rekomendasi kelayakan ruang dari Bupati di 8 kecamatan.</i></p>
--	--

SASARAN KELIMA:

NO.	SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
1	<i>Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal</i>	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

Rincian :

7).Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

a..Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 227.570.800,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 222.560.500,-
- Prosentase : 97,80%

b..Output : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat .

c..Outcome : Neningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dalam Masyarakat.

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<i>Terlaksananya Pengamanan Semana Santa,Lebaran,Natal,Penutupan Tahun pengamanan semuanya berjalan dalam keadaan aman dan tertib</i>

Kesimpulan Realisasi Belanja Daerah Untuk Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Flores Timur

Anggaran Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Pada Tahun Anggaran Tahun 2019 dapat di rincikan Sebagai Berikut :

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana
4				Pendapatan	0.00	0,00	
4	1	4		Lain lain Pendapatan yang sah	0.00	0,00	
5				Belanja Daerah	6.224.325.110,-	6.124.268.283,-	02
5	1			<i>Belanja Tidak langsung</i>	3.878.610.800,-	3.649.038.108,-	02
5	2	1		<i>Belanja Pegawai</i>	3.723.610.800,-	3.693.790..258,-	02
5	2	1	01	Gaji dan Tunjangan	3.242.460.800,-	3.231.986.108,-	02
5	2	1	02	Tambahan Penghasilan	436.150.000,-	417.050.000,-	02
5	2			Belanja Langsung	2.545.714.310,-	2.475.232.175,-	01,03
5	2	1		<i>Belanja Pegawai</i>	1.035.125.000,-	1.025.094.800,-	01,03
5	2	1	01	Honorarium PNS	41.825.000,-	41.825.000,-	01
5	2	1	02	Honorarium Non PNS			03

						948.805.580,-	924.655.580,-	
5	2	1	03		Uang Lembur	45.000.000,-	44.754.150,-	01
5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.378.934.710,-	2.329.863.225,-	03
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	57.178.610,-	56.910.025,-	03
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	227.475.000,-	219.942.200,-	03
5	2	2	05		Belanja Perawatan kendaraan Bermotor	73.962.000,-	73.703.750,-	03
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Pengadaan	20.123.100,-	18.837.350,-	03
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	57.270.000,-	52.690.000,-	03
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	841.168.000,-	836.082.840,-	03
5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	39.183.000,-	36.522.000,-	03
5	2				Belanja Modal	121.779.600	100.614.800,-	01,03
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.779.600,-	100.614.800,-	01.03
5	2	2	16		Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Komputer	25.530.000,-	25.530.000,-	
SURPLUS / DEFISIT						(6.224.325.110,-)	(6.124.268.283,-)	
SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN						(6.224.325.110,-)	(6.124.268.283,-)	

Catatan Keterangan Sumber Dana :

- 1) : 01 (Pendapatan Asli Daerah / PAD)
 2) : 02 (Dana Bagi Hasil)
 3) : 03 (Dana Alokasi Umum / DAU)

Anggaran bersumber dari APBD Kab.Flortim Tahun Anggaran 2019 untuk Sat Pol PP sebesar Rp. **6.224.325.110,-** .-,Realisasi sebesar Rp. **6.124.268.283,-** dengan rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **3.878.610.800,-** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **2.545.714.310,-** .-,

1. Penanggulangan dan Kendalanya.

Lingkungan Internal :

- 1 Masih kurangnya pemahaman terhadap prosedur kerja.
- 2 Masih kurangnya motivasi kerja pegawai.
- 3 Masih adanya tumpang tindih pekerjaan.
- 4 Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Satpol PP.

Lingkungan Eksternal :

- 1 Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur masih belum sepenuhnya dipahami dan dikenal oleh instansi atau unit kerja lainnya sehingga dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan keterlibatan Polisi Pamong Praja belum dikoordinasikan dengan baik.
- 2 Adanya image yang kurang kondusif terhadap keberadaan Satpol PP.
- 3 Kurangnya keterlibatan aktif dari Satpol. dgn Banpol PP Kecamatan sehingga dalam hal koordinasi antar Wilayah berjalan lambat dan kurang responsif.

Upaya yang dilakukan :

- 1 Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan penegasan kepada para Pimpinan SKPD dan Instansi terkait lainnya yang mempunyai Perda bersifat mengatur agar Proses penyelidikan, penyidikan terhadap masalah-masalah pelanggaran Perda dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di wilayah Flores Timur untuk menyelesaikannya secara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan melibatkan PPNS yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flotim.
- 2 Mengadakan pelatihan dan Bimbingan teknis bagi Anggota Satpol.PP Kab. Flotim guna meningkatkan sumber daya aparatur bagi kelancaran pelaksanaan tugas
- 3 Lebih mengutamakan upaya preventif daripada upaya represif dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya para pengunjuk rasa yang menyalurkan aspirasinya agar tidak berbuat anarkis guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2019, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan salah satu kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dalam mengelola sumber daya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 5 sasaran tersebut adalah sebesar **97,23 %**. (*Catatan berdasarkan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019*) Kondisi ini menunjukkan bahwa di samping keberhasilan yang telah diraih, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan pembenahan. Dari seluruh sasaran di antaranya belum mencapai tingkat kinerja 100%.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya hubungan struktural antara organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat Banpol PP Kecamatan. Konsekuensi dari hubungan seperti ini adalah terjadinya perbedaan hak kepegawaian yang diterima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dengan aparat Banpol PP Kecamatan. Dengan demikian timbul kecemburuan yang mengakibatkan terganggunya koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dengan Banpol PP Kecamatan.
2. Perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Minimnya fasilitas pendukung, baik menyangkut dana, kendaraan operasional, gedung pengamanan barang sitaan dan peralatan yang menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Penempatan Beberapa Pejabat Struktural Tidak sesuai dengan Kopentensi
6. Kurangnya jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sebanding dengan beban tugas yang seharusnya dilaksanakan.

7. Kondisi geografis Kabupaten Flores Timur sebagai Kabupaten kepulauan dengan topografis yang sulit.

strategi Pemecahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Penempatan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengacu pada peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).
2. Perlu ada penghargaan terhadap hak-hak kepegawaian anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Perlu ada penambahan sarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Perlu ada peningkatan kualitas SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Perlu ada penambahan alokasi dana operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Mutasi Beberapa Jabatan yang di anggap sangat Urgen perlu di pertimbangkan Kecakapan dan kemampuan Bekerja.
7. Perlu ada penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Pemerintah Daerah perlu mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat melalui produk hukum yang jelas dan tegas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur tahun 2019, untuk diketahui.

Larantuka, Januari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Flores Timur,

DONATUS KOPONG WERAN, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600727 199303 1 002

